

Implementasi Regrouping dalam Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi anggaran Pendidikan

Muh Ihsan¹, Ghuftron Abdullah², Ngurah Ayu Nyoman Murniati³

Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Bringin¹, Universitas PGRI Semarang^{2,3}

e-mail: ihsanmuh0770@gmail.com¹, ghuftronabdullah@upgris.ac.id², ngurahayunyoma@upgris.ac.id³

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima: 14 Januari 2022

Revisi: 16 Maret 2022

Disetujui: 19 April 2022

Dipublikasikan: Juni 2022

Keyword

Regrouping

Efektifitas Anggaran Pendidikan

Efisiensi Anggaran Pendidikan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme, efektivitas dan efisiensi anggaran pendidikan pada implementasi kebijakan regrouping SD Negeri Wiru 01 Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan tehnik observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang regrouping di SD Negeri Wiru 01 dan SD Negeri Wiru 02 adalah: (1) kedua sekolah berada dalam satu lokas; (2) tiga ruang kelas tidak terpakai; (3) SD Wiru 01 hanya 16 siswa terdiri dari 3 kelas; (4) kurangnya tenaga pendidik di SD Negeri Wiru 01. Mekanisme pelaksanaan regrouping di SD Wiru 01 meliputi pendataan, sosialisasi, penetapan, dan penyatuan sekolah. Regrouping SD Wiru 01 mampu meningkatkan efektivitas dalam hal (1) pemanfaatan gedung, (2) pelayanan bagi siswa, (3) pengelolaan sarana dan prasarana, (4) penanaman budaya sekolah. Regrouping SD Wiru 01 juga meningkatkan efisiensi meliputi: (1) pemanfaatan gedung yang ditinggalkan, (2) kepemimpinan kepala sekolah, (3) pengelolaan tenaga kependidikan, (4) pengelolaan keuangan, (5) kedudukan komite

Artikel ini dapat diakses secara terbuka dibawah lisensi CC-BY-SA



Pendahuluan

Pemerataan pendidikan telah mendapat perhatian sejak lama terutama di negara-negara berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan merupakan peran penting dalam pembangunan bangsa. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bias menikmati pendidikan secara sama. Menurut UUD 1945 pemerintah bertanggungjawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan factor determinan bagi suatu bangsa untuk bisa memenangi kompetisi global.

Salah satu upaya dalam pemerataan pendidikan adalah dengan penggabungan/ regrouping sekolah. Kebijakan penggabungan sekolah (regrouping) didasarkan UU No. 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS (Bab V, Nomor 14) yang menjelaskan bahwa salah satu kegiatan pokok dalam pemerataan ini ditujukan untuk mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka program pemerataan pendidikan dasar dapat dilakukan melalui Revitalisasi serta penggabungan (regrouping) sekolah-sekolah agar sekolah memiliki gedung sekolah dan fasilitas yang memadai. Kebijakan

Regrouping dilakukan berlandaskan pada efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan terutama untuk sekolah dasar.

Penggabungan (regrouping) sekolah telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, yaitu di Bab VI Pasal 23 - 26 terkait Pengintegrasian Sekolah. Kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan banyak sekolah khususnya sekolah dasar setiap tahun mengalami penurunan jumlah peserta didik. Penurunan jumlah peserta didik bahkan menyebabkan sekolah memiliki jumlah peserta didik yang tidak efisien baik penggunaan dana maupun pendidik dan tenaga kependidikan. Kondisi seperti ini dialami di beberapa kecamatan di wilayah Disdikbudpora Kabupaten Semarang termasuk Kecamatan Bringin. Di beberapa sekolah di Kecamatan Bringin tidak mampu memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 pasal 24 yang menyebutkan bahwa bahwa jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD dalam satu kelas paling sedikit 20 dan paling banyak 28 siswa.

Adapun berbagai alasan mengenai diadakannya regrouping dan pergantian nama sekolah dasar negeri adalah untuk efektifitas dan efisiensi kelembagaan dalam proses belajar mengajar pada tingkat sekolah dasar, seperti yang telah disebutkan dalam tujuan kebijakan. Harapan itu tentunya dapat terwujud seiring berjalannya waktu sebagai hasil dari tujuan kebijakan, seperti pendapat Van Meter dan Horn (Wibawa, 2014) bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan pemerintah dan swasta sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Implementasi regrouping sekolah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran pendidikan. Menurut Ravianto (2014), pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Menurut Gibson (Bungkaes, 2013), pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka mereka dinilai semakin efektif. Menurut Yudhaningsih (2011) menjelaskan keefektifan merupakan derajat di mana sebuah organisasi mencapai tujuannya. Keefektifan itu merupakan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Keefektifan juga bisa menjadi konsep kausal secara esensial, dimana hubungan maksud hingga tujuan (means-to-end relationship), dan hubungan sebab-akibat (cause-effect relationship) Arwildayanto, dkk (2017). Menurut Adisasmita (2011) efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki.

SD Wiru 01 merupakan sekolah dasar hasil regrouping dari SD Negeri Wiru 01 dan SD Negeri Wiru 02. Sebagai sekolah hasil regrouping SD Wiru 01 memiliki gedung ruang yang sangat memadai. Tidak hanya itu SD Wiru 01 juga berdekatan dengan TK PGRI Wiru dan bahkan berada dalam satu lokasi. Regrouping SD Negeri Wiru 01 didasarkan pada SK Bupati Semarang No. 900/0413/2014 tentang penggabungan sekolah di Kabupaten Semarang.

Berdasarkan hal di atas maka peneliti menetapkan fokus penelitian pada analisis kebijakan regrouping SD Wiru 01 di Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang dengan sub fokus mengenai latar belakang, mekanisme, efektivitas dan efisiensi regrouping.

Metode Penelitian

A. Setting

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Wiru 01 Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang yang beralamat di Dusun Wiru Rt. 03/ RW. 01 Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei 2022.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Afrizal (2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu Sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta penelitian tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Lebih lanjut Denzin dan Lincoln dalam (Moleong, 2013) menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian pada penelitian survei ini adalah Kepala Sekolah Mantan Kepala, Komite Sekolah, dan Guru SD Wiru 01 serta Guru TK PGRI Wiru, Kabupaten Semarang

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengetahui tentang pembiayaan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Wiru 01, Bringin, Kabupaten Semarang.

E. Teknik Analisis dan Keabsahan Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data berdasarkan model miles dan huberman. Miles & Huberman (Sugiyono, 2010), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Dalam analisis data kualitatif menurut model Miles dan Huberman terdapat empat langkah, yaitu: (1) Pengumpulan data; (2) Penyajian Data (Data Display); (3) Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif memerlukan sejumlah kriteria tertentu. Menurut Moleong (2013) ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). Masing-masing kriteria tersebut menggunakan kriteria sendiri sendiri.

Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Pelaksanaan Regrouping

Regrouping SD Negeri Wiru 01 secara alami telah berlangsung selama 3 tahun sebelum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang mencanangkan kebijakan regrouping pada tahun 2014. Mekanisme pelaksanaan regrouping di SD Negeri Wiru 01 mengacu pada Keputusan Menetri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002, pasal 26 tentang tatacara pengintegrasian sekolah negeri. Mekanisme implementasi kebijakan regrouping di SD Negeri Wiru 01

a. Pendataan

Pendataan dilakukan terhadap sekolah yang memenuhi kriteria diregroup. Hasil pendataan menunjukkan bahwa SD Negeri Wiru 01 dan SD Wiru 02 memang memenuhi persyaratan untuk di regrouping, selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang untuk ditindaklanjuti. Hal ini sesuai penelitian Purwaningsih (2014), melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan regrouping sekolah dasar beserta monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program regrouping sekolah dasar di Kabupaten Purworejo tahun 2014. Dengan kesimpulan: implementasi kebijakan regrouping sekolah dasar diawali dengan pendataan terhadap sekolah-sekolah dasar yang kemudian dipetakan berdasarkan skala prioritas oleh tim penghapusan dan penggabungan sekolah.

b. Sosialisasi

Tahap sosialisasi dilakukan sebanyak tiga kali. Pertama sosialisasi tingkat Kabupaten dengan menghadirkan seluruh kepala sekolah yang akan menjadi sasaran regrouping Kabupaten Semarang. Kedua, sosialisasi tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Kepala sekolah sasaran regrouping se kecamatan Bringin yang bertempat di SD Negeri Pakis 01, sedangkan sosialisasi tahap ketiga kepada semua pemangku kepentingan (Stakeholders) dengan tujuan agar semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama tentang manfaat regrouping bagi semua pihak terutama bagi peserta didik. Sosialisasi di tingkat sekolah tentang pelaksanaan regrouping di SD Negeri Wiru 01 dilaksanakan padahari Sabtu, 22 Pebruari 2014. Berdasarkan dokumentasi dan wawancara yang diperoleh peneliti, sosialisasi dihadiri beberapa pemangku kepentingan yaitu: kepala sekolah, para guru, pengurus komite, Kepala UPTD, Pengawas Sekolah, Kepala Desa Guru TK PGRI Wiru serta seorang perwakilan orang tua siswa. Dalam kegiatan sosialisasi dibahas tentang rencana penempatan tenaga kependidikan, rencana penyatuan siswa dan pengelolaan sarana prasarana serta penetapan nomenklatu sekolah. Dalam tahap ini berjalan dengan lancar tidak ada gejolak baik dari orang tua maupun para guru semua bisa menerima. Hal ini sesuai dengan penelitian Purwaningsih (2014) yang menyatakan bahwa hasil pemetaan menjadi dasar untuk melakukan sosialisasi terhadap sekolah untuk menentukan sekolah sasaran regrouping.

c. Penetapan

Penetapan mengenai sekolah yang akan digabung/ regroup dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang untuk diusulkan kepada Bupati yang selanjutnya diterbitkan SK Bupati Semarang tentang sekolah yang diregroup.

d. Penyatuan

Setelah SK regrouping diterima sekolah maka sekolah melakukan penyatuan dalam administrasi sekolah mengenai siswa, guru, sarana prasarana, penggunaan bangunan sekolah dan aset lainnya. SD Negeri Wiru 01 merupakan sekolah yang berhasil mengimplementasikan kebijakan regrouping, Ini dapat dilihat dari adanya perubahan yang dibawa oleh implementasi kebijakan regrouping di SD Negeri Wiru 01 telah memenuhi derajat perubahan yang diinginkan, baik perubahan fisik maupun non fisik. Perubahan secara fisik terlihat dalam segi pembelajaran, hubungan antar guru, penambaham sarana prasarana akibat penggabungan dua lembaga, serta pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mengarah pada kondisi yang lebih baik seiring bertambahnya jumlah murid sehingga memudahkan sekolah dalam melakukan berbagai kegiatan, adanya satu kepemimpinan, proses pembelajaran menjadi lebih efektif, antusias orang tua dan masyarakat bertambah, minat belajar dan prestasi siswa semakin meningkat. Perubahan secara non fisik terlihat dari beban kerja guru lebih ringan karena tercukupinya tenaga pendidik, iklim kerja menyenangkan, hubungan silaturahmi antar guru lebih luas, dan guru lebih berinovasi.

2. Efektifitas Pengelolaan Pendidikan di SD Negeri Wiru 01

Efektivitas kebijakan regrouping SD Wiru 01 nampak pada:

a. Pemeliharaan dan Perawatan Gedung

Regrouping SD Negeri Wiru 01 meningkatkan efektivitas pada pemeliharaan gedung sekolah. Efektivitas ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: penentuan regrouping tepat waktu. Pada saat itu ada 3 ruang kelas SD Wiru 01 yang tidak terpakai sehingga dengan regrouping ruang yang tidak terpakai tersebut bisa

dimanfaatkan untuk ruang belajar TK PGRI Wiru. Penentuan regrouping juga tepat dalam penentuan tujuan. Salah satu tujuan regrouping adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Regrouping menyebabkan sekolah dapat memanfaatkan fasilitas gedung yang ada untuk berbagai kepentingan sekolah.

b. Layanan Bagi Siswa Lebih Optimal

Setelah adanya penyatuan siswa akibat dari regrouping jumlah siswa menjadi semakin banyak namun diimbangi pula dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang cukup pula karena adanya penggabungan dari dua sekolah sehingga pelayanan bagi siswa baik pelayanan bimbingan maupun pembelajaran bisa lebih optimal yang pada perkembangannya prestasi siswa terus meningkat hingga saat ini.

c. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sumber peralatan atau sarana prasarana yang digunakan dalam implementasi kebijakan regrouping adalah dengan menggabungkan semua sarana prasarana yang ada di dua lembaga, yaitu di SD Negeri Wiru 01 dan di SD Negeri Wiru 02 sehingga akan lebih menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Berdasarkan data dokumentasi yang didapatkan peneliti jumlah sarana dan prasarana yang diserahkan ke SD negeri Wiru 01 sejumlah 40 macam, (DV.5), sedangkan dokumen seperti stempel, buku induk dan sertifikat / piagam Status Sekolah sesuai ketentuan diserahkan kepada Dinas Pendidikan setempat yaitu UPTD Pendidikan Kecamatan Bringin. Hal ini sesuai dengan

d. Penanaman Budaya Sekolah melalui pembiasaan

Setelah kedua sekolah digabung maka SD Wiru 01 mencanangkan penanaman karakteristik siswa melalui pembiasaan. Wibawa (2009) menyatakan mengenai dampak penggabungan sekolah dasar terhadap efisiensi, keefektifan, produktifitas dan pelayanan pendidikan di SD Teruman Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dampak penggabungan sekolah dilihat dari efisiensi penggunaan dana yang dimiliki sekolah sudah tergolong efisien. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya beberapa penghematan alokasi dana yang dimiliki SD Teruman yakni alokasi dana untuk gaji guru, untuk kegiatan ekstrakurikuler, untuk pengembangan profesionalitas guru menjadi lebih kecil setelah adanya penggabungan sekolah. Hal yang sama juga terjadi pada SD Bantul Manunggal terjadi penghematan alokasi dana untuk pengembangan sarana dan prasarana setelah penggabungan sekolah. Pelayanan pendidikan yang semakin merata setelah penggabungan dilihat dari pemerataan pelayanan pendidikan di wilayah-wilayah yang semakin menjangkau semua kalangan, usia, dan jarak

3. Efisiensi Pengelolaan Pendidikan Setelah Regrouping

Efisiensi pengelolaan pendidikan setelah regrouping nampak pada :

a. Pemanfaatan Gedung

Dengan diadakan regrouping maka pemanfaatan gedung yang semula 12 kelas dengan jumlah siswa yang tidak sesuai standar minimal yakni 20 bahkan ada 3 ruang kelas yang tidak terpakai maka dengan adanya regrouping 12 ruang kelas tersebut dimanfaatkan untuk; 6 ruang kelas sisanya untuk ruang laboran, musholla, gudang dan 3 ruang dihibahkan untuk ruang belajar TK PGRI Wiru sebagai embrio siswa SD Wiru 01.

b. Kepala Sekolah tidak mengampu

Sebelum diregroup Bapak Sugeng merupakan Kepala Sekolah SD Wiru 02 sekaligus mengampu SD Wiru 01. Tugas mengampu ini mengakibatkan kerepotan

tersendiri bagi Kepala Sekolah. Setelah diregroup Kepala Sekolah hanya menjabat satu sekolah.

c. Pengelolaan Keuangan

Dengan digabungnya siswa SD Negeri Wiru 01 dan SD Negeri Wiru 02 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi bertambah seiring bertambahnya jumlah murid sehingga memungkinkan sekolah untuk melakukan berbagai kegiatan. Efisiensi pengelolaan keuangan setelah regrouping tampak pula pada penghematan honor guru kegiatan ekstrakurikuler biaya pengembangan profesionalisme guru menjadi lebih kecil, Pernyataan di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarwa Wibawa (2009) mengenai dampak penggabungan sekolah dasar terhadap efisiensi, keefektifan, produktifitas dan pelayanan pendidikan di SD Teruman Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dampak penggabungan sekolah dilihat dari efisiensi penggunaan dana yang dimiliki sekolah sudah tergolong efisien.

d. Adanya Penyatuan Komite

Adanya penyatuan komite pasca regrouping SD Negeri Wiru 01 dan SD Negeri Wiru 02 menyatu pula gagasan- gagasan atau ide baru untuk kemajuan sekolah selanjutnya, misalnya gagasan pendirian mushola yang terealisasi pada tahun 2007 merupakan kerjasama sepenuhnya masyarakat dan orang tua, Hal ini sesuai dengan Penelitian Waluyo (2014) yang dilakukan di SD Undaan Tengah 01 Kudus. Dampak positif dalam pengelolaan tenaga pendidikan khususnya guru, pengembanag kelas paralel, pengelolaan dana, pengelolaan sarana prasarana utamanya terkait dengan buku dan perabot sekolah dan penyatuan komite sekolah.

Simpulan

Pelaksanaan regrouping di SD Negeri Wiru 01 berjalan dengan baik dan pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah nomor 4 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Mekanisme pelaksanaan regrouping di SD Negeri Wiru 01 dimulai dari pendataan jumlah siswa dan guru, sosialisasi regrouping mulai tingkat kabupaten hingga tingkat sekolah, penetapan sekolah yang diregroup oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang regrouping sekolah se Kabupaten Semarang dan terakhir penyatuan aset dari kedua sekolah yang digabung. Penggabungan (regrouping) sekolah meningkatkan Efektifitas dan efisiensi bagi pengelolaan pendidikan di SD Negeri Wiru 01 telah tercapai. Efektifitas penyelenggaraan pendidikan tersebut misalnya: 1) Pemeliharaan dan perawatan gedung, 2) Pelayanan pembelajaran bagi siswa, 3) Penyatuan budaya sekolah, 4) Pemanfaatan sarana dan prasarana. Sedangkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan setelah regrouping misalnya, 1) Pemanfaatan gedung yang ditinggalkan. 2) Pemenuhan tenaga kependidikan, 3) Pengelolaan keuangan, 4) Adanya satu kepemimpinan, 5) Adanya penyatuan komite. Peneliti memberikan rekomendasi kepada sekolah agar senantiasa meningkatkan mutu dan daya saing sekolah sehingga sekolah benar-benar diminati masyarakat sehingga tidak diperlukan lagi regrouping sekolah.

Daftar Pustaka

Adisasmata, Rahardjo (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu

-
- Afrizal. (2016). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Alrwildayanto, dkk. (2017). Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Widya Padjadjaran
- Bungkaes, H.R., dkk., (2013). Hubungan efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal ACTA DIURNA, Edisi April 2013
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, yaitu di Bab VI Pasal 23 - 26 terkait Pengintegrasian Sekolah
- Moleong, Lexy J. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Peraturan Bupati Semarang No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Semarang
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 pasal 24
- Purwaningsih, Ika. (2014). Implementasi kebijakan Regrouping Sekolah Dasar Di Kabupaten Purworejo. Jurnal. PPs-UNY.
- Ravianto. (2014). Produktivitas dan Manajemen. Jakarta: LISP
- SK Bupati Semarang No. 900/0413/2014 tentang penggabungan sekolah di Kabupaten Semarang
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
- UU No. 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS
- Wibawa, Sarwa. (2009). Dampak penggabungan sekolah dasar terhadap efisiesni, keefektivan, produktivitas, dan pelayanan pendidikan di kabupaten bantul. Tesis. PPs-UNY
- Yudhaningsih, R. (2011). Peningkatan Efektivitas Kerja Melalui Komitmen, Perubahan dan Budaya Organisasi. Jurnal Pengembangan Humaniora, Vol. 11(1), pp.40-50